

ANALISIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA GAYAM KABUPATEN KEDIRI

Indah Putri Kurniawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

indah.18040@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

debyepriyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Peningkatan pembangunan desa dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan yang dilakukan, salah satunya melalui kegiatan musrenbang desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan musrenbang desa serta adanya peningkatan pembangunan di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi pengamatan langsung, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi berupa foto dan informasi tertulis. Subjek penelitian melibatkan 6 orang yang merupakan sekretaris desa, ketua RW 6, dan 4 masyarakat. Ada enam prinsip yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa menurut Ariadi (2019) antara lain: 1) partisipasi, masyarakat aktif dilibatkan dalam pembangunan desa. 2) transparansi, pemerintah desa transparan terhadap informasi pembangunan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. 3) selektif, seleksi masalah dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. 4) akuntabel, pertanggungjawaban ditunjukkan melalui tahapan yang dilalui mulai perencanaan sampai realisasi anggaran. 5) pemberdayaan, difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi wisata Pancar Wonotirto dan rest area. Serta 6) keberlanjutan, pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga manfaat dapat dirasakan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa kerjasama seluruh elemen yang ada di masyarakat sangat baik. Mulai dari pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Semua pihak memiliki kontribusi dalam pembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, hubungan antar elemen masyarakat perlu dipertahankan dengan menjaga komunikasi yang baik.

Kata kunci: musrenbang, perencanaan, desa

Abstract

The increase in village development is influenced by development planning carried out, one of which is through village musrenbang activities. This study aims to describe the implementation of the village musrenbang and the increase in development in Gayam Village, Gurah District, Kediri Regency. This research is included in descriptive qualitative research. With data collection techniques through direct observation, unstructured interviews, and documentation in the form of photos and written information. The research subjects involved 6 people who were the village secretary, heads of RW 6, and 4 people. There are six principles used in village development planning according to (Ariadi, 2019) including: 1) participation, the community is actively involved in village development. 2) transparency, the village government is transparent about development information that needs to be conveyed to the community. 3) selective, selection problems are carried out according to the needs of the community in each region. 4) accountable, accountability is shown through the stages that are passed from planning to budget realization. 5) empowerment, focused on empowering rural communities to develop tourism potential of Pancar Wonotirto and rest areas. 6) sustainability, development is carried out in an integrated manner gradually so that the benefits can be felt by the community. Based on the research conducted, information is obtained that the cooperation of all elements in the community is very good. Starting from the village government, village institutions and the community. All parties have a contribution in village development. To support the implementation of development in the village, relationships between elements of society need to be maintained by maintaining good communication.

Keywords: musrenbang, planning, village

PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan adanya perubahan baik infrastruktur maupun struktur sosial. Menurut Syaifullah (2008) pembangunan berkaitan dengan 2 jenis, yaitu pembangunan yang bersifat fisik berupa fasilitas umum dan sarana prasarana serta pembangunan bersifat non fisik seperti pembinaan keterampilan masyarakat dan upaya peningkatan kualitas masyarakat. Puspitaningrum dan Lubis (2017) berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses ataupun kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga menyangkut pada manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan yang dilakukan. Manfaat program pembangunan dapat dirasakan masyarakat apabila ada partisipasi secara langsung dari masyarakat penerima program (Aprilian, 2015). Di era 1990-an berkembang paradigma pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan. Pembangunan manusia adalah upaya pengembangan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manusia serta kualitas sumber daya manusia melalui partisipasi aktif untuk memperbaiki kehidupannya (Yektiningsih, 2018).

Pembangunan manusia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain bertumpu pada upaya peningkatan kualitas SDM, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya kesamaan prioritas pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang meliputi pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesamaan prioritas pembangunan juga dapat menciptakan kesinambungan program pembangunan baik antar daerah maupun daerah dengan pusat. Berikut adalah salah satu bentuk kesamaan prioritas pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan daerah:

Tabel 1. Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Nasional	Provinsi
Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi, dan penguatan	Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan Jawa

sistem kesehatan nasional.	Timur, Reformasi Sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana, dan optimalisasi agrobis berbasis sinergitas desa-kota.
----------------------------	--

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Tema pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Perekonomian Daerah Didukung oleh Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia” dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian
2. Pembangunan ekonomi melalui penguatan sarana prasarana pendukung
3. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan pemerintahan yang profesional
4. Stabilitas politik, dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal (RKPD Kabupaten Kediri, 2021).

Lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menghapuskan kesenjangan antara penduduk yang tinggal di desa dan kota. Karena hal tersebut selalu menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional (Alamsyah, 2011). Oleh karena itu, kesamaan prioritas pembangunan tidak berhenti pada tingkat Kabupaten/Kota saja melainkan harus dilanjutkan sampai pada pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan program pembangunan yang dijalankan pemerintah, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan adanya keselarasan program pembangunan di seluruh tingkatan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Salah satu kewenangan yang disebutkan di atas yaitu terkait pembangunan desa yang diartikan oleh Adisasmita (dalam Aprilian, 2015) sebagai seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat dan menerapkan prinsip gotong royong. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, pengembangan potensi, dan sumber daya yang dimiliki.

Wilayah desa sering dikaitkan dengan ketertinggalan, oleh karena itu pembangunan desa perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan kondisi masyarakat (Puspitaningrum dan Lubis, 2017). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan desa antara lain: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, 3) aksesibilitas/transportasi, 4) pelayanan umum, 5) penyelenggaraan pemerintahan, 6) evaluasi hasil indeks (Harmadi dkk, 2020). Selanjutnya Ariadi (2019) juga menyebutkan dalam upaya pembangunan desa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan selama proses perencanaannya, antara lain: 1) pemberdayaan, 2) partisipatif, 3) berpihak pada masyarakat, 4) terbuka atau transparansi, 5) akuntabel, 6) selektif, 7) efisien dan efektif, 8) keberlanjutan, 9) cermat, 10) proses berulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa yang dikemukakan oleh Ariadi (2019). Prinsip tersebut dipilih karena dapat menggambarkan indikator - indikator yang diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Serta dapat digunakan untuk melihat indikator apa saja yang mempengaruhi peningkatan pembangunan, khususnya di tingkat desa.

Siagian (2018) menyebutkan ada 7 ide pokok dalam pembangunan, salah satunya adalah pembangunan dilakukan secara terencana. Sehingga keberhasilan program pembangunan juga bergantung pada perencanaan yang dilakukan. Menurut Anggara dan Sumantri (2016) perencanaan diartikan sebagai alternatif atau pilihan yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga dalam penyusunan rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif/pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Anggara dan Sumantri (2016) juga menyebutkan menurut waktu, perencanaan terbagi menjadi 3 jenis antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan dalam jangka waktu 20 tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), perencanaan yang berlaku untuk 5 tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Pendek, perencanaan pembangunan tahunan. Atau

dikenal juga dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu dalam merencanakan program pembangunan, setiap daerah perlu berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di tingkat pusat. Sehingga ada kesinambungan antara pembangunan di daerah dan pembangunan yang direncanakan secara nasional.

Jika dikaitkan dengan program perencanaan dalam prosesnya dikenal istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

“Musrenbang RKPD hari ini merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, jadi kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah itu dimulai dari perencanaannya. Saya selalu tekankan berkali-kali bahwa kalau membuat perencanaan harus betul-betul matang”. Jelas Bupati Kediri (Kediri, 2021)

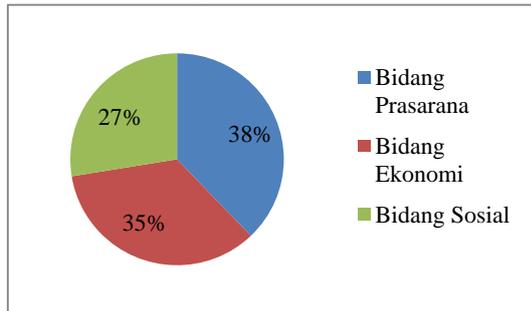
Musrenbang dilakukan mulai lingkup terkecil yaitu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan dilanjutkan pada tingkat pusat. Musrenbang merupakan wadah aspirasi masyarakat dalam memberikan usulan terkait pembangunan yang sesuai di wilayah tersebut, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Musrenbang desa akan menghasilkan usulan-usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan selanjutnya.

Usulan dari Musrenbang desa akan dikelompokkan ke dalam 3 bidang antara lain ekonomi, sosial budaya, dan prasarana. Dimana ketiga bidang tersebut memberikan gambaran terhadap arah pembangunan yang direncanakan.

“Pengelompokan usulan ke dalam 3 bidang menggunakan kamus usulan, yang selanjutnya akan diarahkan ke bidang-bidang. Misal kamus pembangunan jalan, kamus bantuan sosial dan lainnya” jelas pak gigih Staff Bidang Analisis Data Bappeda Kabupaten Kediri.

Jadi usulan yang sebelumnya telah diajukan dalam musrenbang tingkat desa dan kecamatan akan di input menggunakan sistem dan akan dikelompokkan sesuai bidang pembangunannya. Berikut

rekapitulasi hasil usulan yang telah disetujui dan dikelompokkan berdasar 3 bidang pembangunan dalam musrenbang Kabupaten Kediri Tahun 2021.

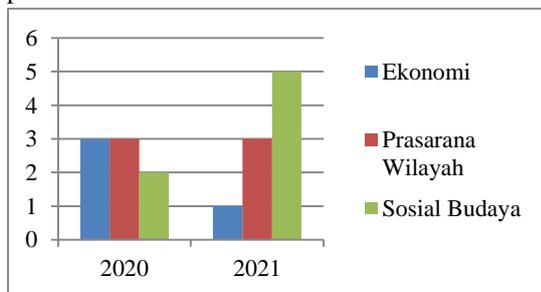


Gambar 1. Rekapitulasi Usulan Musrenbang

Kabupaten Kediri Tahun 2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa usulan yang disetujui dalam musrenbang Kabupaten Kediri paling banyak di bidang prasarana. Dari 214 usulan dalam musrenbang yang berasal dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri, 81 usulan atau 38% dari total keseluruhan berkaitan dengan usulan pembangunan di bidang prasarana. Sedangkan bidang ekonomi dengan 74 usulan (35%) dan bidang sosial dengan 59 usulan (27%). Salah satu alasan tingginya usulan pada bidang prasarana berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, perlu didukung dengan pemerataan aksesibilitas serta kualitas infrastruktur perekonomian.



Gambar 3. Rekapitulasi Usulan Musrenbang Kecamatan Gurah Tahun 2020-2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Hasil rekapitulasi usulan musrenbang di tingkat Kecamatan Gurah menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir terdapat peningkatan dan penurunan di bidang ekonomi dan sosial budaya, sedangkan pada bidang prasarana dari tahun 2020-2021 jumlah usulan tetap. Bidang ekonomi mengalami penurunan dari 3 usulan di tahun 2020 menjadi 1 usulan di tahun 2021. Sedangkan bidang sosial mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2020 hanya 2 usulan, menjadi 5 usulan di tahun 2021. Berbagai kegiatan yang diajukan dalam

musrenbang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat.

Tabel 2. Data Usulan Musrenbang Desa Gayam Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Usulan	Lokasi	Ket.
1.	2018	Peningkatan Jalan Hotmix	Jl. Cempaka Wonokasian dan Jl. Sudirman Recopotul	1 m
2.	2019	-	-	-
3.	2020	Pembangunan Jalan untuk Hotmix	Jl. Darmo	900 m

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, perlu kesinambungan prioritas pembangunan baik dari pusat sampai dengan desa. Berdasarkan data yang ada, mulai tahun 2018-2020 usulan pembangunan dari Desa Gayam yang diajukan dalam musrenbang hanya seputar pembangunan dan perbaikan jalan. Tetapi pada realitanya, pembangunan yang dilakukan di Desa Gayam tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Melainkan ada banyak program pembangunan yang sedang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa.



Gambar 2. Bukti Pembangunan di Desa Gayam

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar di atas menunjukkan beberapa pembangunan yang dilakukan di Desa Gayam. Pembangunan yang ada antara lain, pertama sesuai dengan yang diajukan dalam data musrenbang yaitu perbaikan jalan desa. Kedua pengembangan potensi wisata yang dikenal dengan Pancar Wonotirto. Pengembangan wisata ini selain untuk memperkenalkan potensi alam yang ada di Desa Gayam juga sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Gayam dengan dibukanya beberapa stand untuk berjualan. Ketiga adalah pembangunan Rest Area. Pembangunan Rest Area ini memberikan banyak manfaat kepada

masyarakat Desa Gayam, salah satunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, lokasi pembangunan juga strategis. Sehingga banyak pengguna jalan yang memanfaatkan Rest Area ini untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan.

Program pembangunan yang diajukan dalam musrenbang juga telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten, namun tidak dipungkiri bahwa dalam implementasi di lingkup kecamatan bahkan desa program pembangunan yang dijalankan belum memberikan manfaat maupun dampak signifikan kepada masyarakat. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat tidak dapat memanfaatkan program pembangunan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang ada khususnya pada tingkat desa, peneliti ingin mengetahui apakah dalam pelaksanaan musrenbang desa program pembangunan yang diusulkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan banyaknya usulan yang diajukan dalam musrenbang apakah dapat menjamin terjadinya peningkatan pembangunan di desa. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir usulan pembangunan Desa Gayam hanya seputar pembangunan jalan, padahal dalam realitanya ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Hal tersebut sejalan dengan alasan peneliti memilih lokus penelitian di Desa Gayam. Melihat adanya peningkatan pembangunan yang cukup signifikan di berbagai sektor, seperti perbaikan infrastruktur seperti jalan, selokan, pengelolaan potensi wisata dan adanya upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pembangunan Rest Area dan pembukaan tempat wisata Pancar Wonotirto. Sehingga melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah desa lain untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di desa untuk dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif menurut Nawawi (dalam Aprilian, 2015). Lokasi penelitian berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada 6 indikator perencanaan

pembangunan desa yang dikemukakan oleh Ariadi (2019) sebagai berikut:

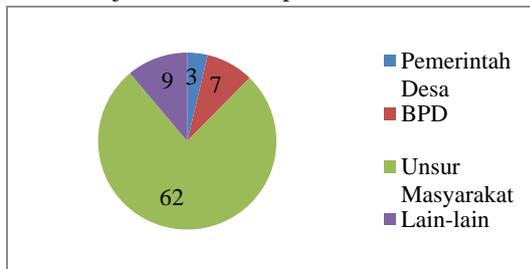
1. Partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa seperti dalam kegiatan musrenbang. Pembahasan ini terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam musrenbang serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan.
2. Transparansi, ketersediaan informasi untuk masyarakat agar mudah mengakses data ataupun informasi lain terkait proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa. Berkaitan dengan sosialisasi kegiatan musrenbang maupun program pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam.
3. Selektif, pemilihan permasalahan harus dilakukan agar program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan seperti menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaan musrenbang program pembangunan yang akan diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri.
4. Akuntabel, pertanggungjawaban terkait perencanaan program pembangunan yang dilakukan. Sehingga perlu diperhatikan setiap tahapan yang dilalui dalam kegiatan musrenbang, mulai perumusan masalah sampai dengan penganggaran.
5. Pemberdayaan, merupakan suatu upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat Desa Gayam dalam mengembangkan potensi wisata yang ada seperti wisata pancar wonotirto serta pembangunan rest area untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Keberlanjutan, program pembangunan yang telah direncanakan harus diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui manfaat yang diterima masyarakat Desa Gayam serta kesesuaian dengan perencanaan yang telah dilakukan.

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2013). Subjek dalam penelitian ini adalah sekretaris Desa Gayam Bapak Nanang Sulisty E.W., S.Pd, ketua RW 6 Dusun Wonokasian sekaligus ketua paguyuban RT/RW

Desa Gayam Bapak Muhammad Zaifut, dan 4 masyarakat yang merupakan unsur pedagang antara lain Ibu Sri Utami, Ibu Kasmianti, Ibu Puji Astuti, dan Ibu Sri Handayani. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dengan pengamatan langsung, wawancara dengan teknik tidak terstruktur, serta dokumentasi berupa foto pelaksanaan musrenbang, daftar hadir, notulensi, berita acara. Teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013). Model analisis data ini memiliki 3 tahapan yang saling berkaitan antara lain, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 4. Rekapitulasi Kehadiran Peserta Musrenbang Desa Gayam Berdasarkan Daftar Hadir tahun 2021

Sumber: Pemerintah Desa Gayam

Data di atas merupakan hasil rekapitulasi dari daftar hadir peserta saat pelaksanaan musrenbang desa tahun 2021. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Gayam telah melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Kegiatan musrenbang di Desa Gayam dihadiri oleh 81 peserta. Terdiri dari 3 orang perangkat desa, 7 orang anggota BPD, 62 orang dari unsur masyarakat yang berasal dari perwakilan RT/RW, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LPMD, serta 9 orang peserta berasal dari

pihak kecamatan, babinsa, bhabinkamtibmas dan dinas terkait.

Pada tahun 2021 perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan musrenbang desa dilakukan untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022. Sedangkan kegiatan musrenbang desa untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah dilakukan di awal periode yaitu tahun 2020. Pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2021 dilaksanakan pada hari senin, 25 oktober 2021. Bertempat di balai Desa Gayam, dan kegiatan dimulai pukul 19.30. Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan musrenbang desa, serta adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor di Desa Gayam dipengaruhi beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan perencanaan harus turut dilibatkan dalam prosesnya (Ma'rif dkk, 2010). Sejalan dengan penelitian ini yang akan berfokus pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam musrenbang desa serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Menurut Sekretaris Desa Gayam Bapak Nanang faktor pendukung yang paling dominan dalam mensukseskan program pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat, dengan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan maupun pembangunan desa.



Gambar 5. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa

Sumber: Pemerintah Desa Gayam

Gambar di atas sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yakni dengan menghadiri kegiatan musrenbang desa. Pada saat proses pelaksanaan musrenbang desa masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan kegiatan pembangunan yang belum disampaikan dalam rancangan RKP Desa.

“Jadi dalam pelaksanaan musrenbang desa, nantinya tiap dusun masih beradu argumen terkait program pembangunan yang akan

dijalankan. Tapi yang jelas, pembangunan tetap diratakan. Misal 5 dusun di Desa Gayam paling tidak setiap dusun ada 1 usulan terkait pembangunan fisik”. (Bapak Zaifut, wawancara 23 Desember 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan musrenbang desa partisipasi aktif dari masyarakat tetap diutamakan. Masyarakat datang tidak hanya untuk menyepakati usulan terkait pembangunan yang akan dijalankan, tetapi juga saling mengajukan pendapat masing-masing. Menurut pemerintah Desa Gayam semua elemen masyarakat yang diundang dalam kegiatan musrenbang desa bisa memberikan tambahan usulan. Namun bisa atau tidaknya usulan tersebut dijalankan tetap menyesuaikan kondisi keuangan desa.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Gayam bahwa unsur yang dilibatkan dalam musrenbang desa berpedoman pada juknis yang diberikan pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari 1) seluruh perangkat Desa Gayam, 2) BPD, 3) babinsa, 4) bhabinkamtibmas, 5) ketua RT/RW, 6) LPMD, 7) PKK, 8) Kapolsek Gurah, 9) Kepala Danramil Gurah, 10) pihak Kecamatan Gurah, 11) karang taruna, 12) tokoh agama, 13) tokoh masyarakat (juru kunci dan pengurus air/klantung). Sedangkan dalam file berita acara musrenbang desa untuk membahas RKP Desa tahun 2022 disebutkan bahwa narasumber musrenbang desa terdiri dari camat, dinas terkait, fasilitator/pendamping program/lembaga lainnya dan kepala desa/aparat pemerintah desa. Sedangkan untuk peserta yang hadir dalam musrenbang terdiri dari 1) pemerintah desa, 2) BPD, 3) delegasi dusun wakil RT/RW, 4) tokoh agama dan tokoh masyarakat, 5) unsur perempuan (sekarang-kurangnya 30 persen), 6) unsur perwakilan masyarakat/kelompok, 7) unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Tabel 3. Klasifikasi Peserta yang Hadir Berdasarkan Daftar Hadir Kegiatan Musrenbang Desa tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Perangkat desa (bendahara desa, kasun Gayam Barat, dan kasun Tondowongso)	3
2.	BPD	7
3.	Babinsa	2
4.	Bhabinkamtibmas	1
5.	Unsur masyarakat (13 RW, 34 RT, 7 PKK, 2 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat)	62

	pengurus air/klantung, dan 5 LPMD)	
6.	Perwakilan kecamatan (camat, sekcam, 3 pendamping kecamatan)	5
7.	Kasie DPMPD	1
Total		81

Sumber: Pemerintah Desa Gayam

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musrenbang Desa Gayam secara umum telah mencakup keseluruhan unsur masyarakat sesuai dengan juknis yang diberikan pemerintah Kabupaten Kediri serta daftar yang disebutkan dalam berita acara. Namun dalam daftar hadir yang ada, ada beberapa unsur yang tidak tercantum seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan beberapa kepala dusun. Meskipun demikian kehadiran Kepala Desa dan Sekretaris Desa Gayam dapat dibuktikan melalui hasil notulensi musrenbang desa.

Menurut pemerintah Desa Gayam, pelaksanaan musrenbang desa biasanya melibatkan 300-400 orang. Selama pandemi covid-19, pelaksanaan musrenbang desa hanya dihadiri sekitar 50% dari keseluruhan. Namun berdasarkan daftar hadir yang ada, peserta yang hadir belum mencapai 50% dari yang direncanakan. Hal tersebut terjadi lantaran Desa Gayam pernah tercatat 48 orang positif covid-19, angka tersebut cukup tinggi. Sehingga untuk mencegah terjadinya penularan virus, pemerintah Desa Gayam membatasi atau meminimalisir jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan musrenbang desa. Meskipun demikian pemerintah Desa Gayam tetap berpedoman pada peraturan yang ada, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk dapat mewakili aspirasi masyarakat lainnya.



Gambar 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa Gayam

Sumber: Instagram @pemdegayam

Selain berpartisipasi dalam proses perencanaan, masyarakat desa juga turut dilibatkan selama proses pembangunan. Disampaikan juga oleh pemerintah Desa Gayam, bahwa masyarakat selalu terlibat dan membantu melalui tenaga saat

pelaksanaan pembangunan desa. Salah satunya dengan gotong royong, masyarakat desa berpartisipasi untuk membantu proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang ada di desa. Menurut salah satu warga, pembangunan desa yang sering kali melibatkan gotong royong masyarakat adalah pembangunan/perbaikan masjid, pembuatan selokan, perbaikan jalan desa dan pembangunan gapura. Salah satu pembangunan yang sedang berjalan dan melibatkan masyarakat adalah perbaikan masjid di Dusun Gayam Timur.

2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi (Safira, 2020). Transparansi menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait pembangunan yang dilakukan. Melalui transparansi informasi yang diberikan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang sedang dijalankan. Sehingga dalam penelitian ini transparansi difokuskan dengan ketersediaan informasi terkait kegiatan musrenbang dan pelaksanaan pembangunan desa yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi terkait pelaksanaan musrenbang dan kegiatan pembangunan yang dijalankan desa disebarkan melalui beberapa media seperti undangan, akun media sosial dan juga banner.



Gambar 7. Undangan Pelaksanaan Musrenbang Desa Gayam Tahun 2021

Sumber: Pemerintah Desa Gayam

Sebagai bentuk transparansi pemerintah desa terkait pelaksanaan musrenbang desa, pemerintah Desa Gayam memberikan undangan kepada masyarakat serta beberapa pihak terkait sesuai daftar yang ada dalam juknis. Pengumuman pelaksanaan musrenbang desa melalui penyebaran undangan kepada masyarakat dilakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan musrenbang desa (Djohan, 2016). Undangan pelaksanaan musrenbang Desa Gayam diberikan kepada masyarakat pada

tanggal 22 Oktober 2021 sedangkan musrenbang desa dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Gayam bersifat transparan terhadap informasi pelaksanaan musrenbang desa yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Selain itu undangan diberikan 3 hari sebelum pelaksanaan musrenbang desa, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti pelaksanaan musrenbang desa.



Gambar 8. Akun Instagram Pemerintah Desa Gayam

Sumber: Instagram @pemdesgayam

Selain memberikan transparansi selama proses pelaksanaan musrenbang desa, pemerintah Desa Gayam juga berupaya menyampaikan progress pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam kepada masyarakat melalui akun media sosial dan pemasangan banner di setiap dusun. Media sosial yang digunakan adalah facebook (ceria gym gym) dan akun instagram resmi pemerintah Desa Gayam (@pemdesgayam). Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pembangunan apa saja yang dilakukan dan memantau sejauh mana pembangunan yang telah dijalankan di Desa Gayam. Meskipun telah merambah pada pemanfaatan media sosial, namun menurut informasi yang diperoleh dari pemerintah Desa Gayam diketahui bahwa penggunaan website desa belum berjalan dan masih dalam tahap pembuatan. Selain itu pemerintah desa juga menyebarkan informasi terkait realisasi anggaran setiap bidang dengan menggunakan banner yang dipasang di kantor Desa Gayam. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait pelaksanaan musrenbang desa ataupun pembangunan yang dilakukan tidak ada pemasangan banner di setiap dusun. Sehingga informasi yang disampaikan terkait hal tersebut disebarkan melalui media sosial dan undangan. Selain itu informasi pembangunan juga disampaikan saat kegiatan pertemuan rutin dengan masyarakat di setiap dusun

bahkan pada lingkup RT dan RW yang ada di Desa Gayam.

“Lebih mudah menyampaikan informasi pembangunan desa melalui pertemuan RT, kalau di banner orang kadang acuh dan tidak terbaca. Kalau disampaikan langsung insyaallah bisa sampai ke warga”. (Bapak Zaifut, wawancara 23 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pendekatan ke masyarakat dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat. Informasi lebih mudah diterima masyarakat apabila disampaikan saat ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan di setiap RT/RW ataupun tiap dusun. Dan untuk penyampaian informasi melalui media sosial tetap dapat dilanjutkan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di luar warga Desa Gayam.

3. Selektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selektif diartikan dengan melalui seleksi atau penyaringan. Berdasarkan definisi tersebut dalam penelitian ini selektif diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk memilih ataupun menyaring permasalahan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan desa. Salah satu upaya yang dilakukan agar program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan menentukan prioritas pembangunan.



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Dusun di Desa Gayam

Sumber: Instagram @pemdesgayam

Proses penentuan prioritas masalah sebelum dilaksanakan program pembangunan di desa dijabarkan pemerintah desa sebagai berikut, dimulai dengan kegiatan musrenbang dusun, setelah itu baru hasil dari musrenbang dusun dibawa dalam forum musrenbang desa. Musrenbang dusun dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat serta menampung aspirasi dan usulan masyarakat di setiap dusun terkait pelaksanaan pembangunan. Sedangkan

musrenbang desa dilakukan untuk menentukan prioritas masalah pembangunan desa dari tahun pertama sampai tahun ke enam selama masa jabatan kepala desa. Prioritas pembangunan yang akan dilakukan di Desa Gayam telah dirangkum dalam RPJM Desa yang telah dilaksanakan pada awal periode yaitu di tahun 2020. Sebagai contoh usulan masyarakat terkait prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa tahun ketiga nantinya akan dimasukkan dan dilaksanakan pada RKP Desa tahun 2022. Penentuan prioritas masalah pembangunan dilakukan berdasar permasalahan yang terjadi pada setiap kelompok yang ada di masyarakat. Serta harus memperhatikan urgensi suatu permasalahan. Sehingga dibutuhkan kajian lapangan pada setiap dusun yang ada di Desa Gayam.

Tabel 4. Daftar Usulan Musrenbang Dusun yang menjadi Prioritas Pembangunan Tahun 2022

No.	Jenis Pembangunan	Kegiatan	Lokasi
1.	Fisik	-Makadam Jl. Cokro -Pembangunan Gedung (Plafon dan Dekor Panggung)	Dusun Gayam Barat
2.	Fisik	Prasarana Posyandu	Dusun Gayam Timur
3.	Fisik	Makadam Jl. Sahid	Dusun Wonokasian
4.	Fisik	Peningkatan Jl. Makam	Dusun Recoputul
5.	Fisik	Peningkatan Jl. Darmo Timur	Dusun Tondo Wongso
6.	Fisik	Penambahan peralatan/ sarana dan prasarana pariwisata desa	Rest Area
7.	Non Fisik	Pembinaan PKK	Desa Gayam
8.	Fisik	Inventaris Kegiatan PKK	Desa Gayam
9.	Non Fisik	Pembinaan masyarakat untuk kegiatan keagamaan	Desa Gayam
10.	Non Fisik	Pelatihan Pengelolaan Pariwisata	Desa Gayam
11.	Non Fisik	Bantuan UMKM	Desa Gayam

12.	Non Fisik	Pelatihan peningkatan aparatur dan lembaga desa	Desa Gayam
-----	-----------	---	------------

Sumber: Pemerintah Desa Gayam

Data di atas menunjukkan bahwa dalam penentuan prioritas pembangunan tetap memperhatikan sebaran pembangunan serta telah mencakup semua sektor kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dari 5 dusun yang ada di Desa Gayam, masing-masing terdapat 1 usulan yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Peningkatan kondisi jalan menjadi salah satu prioritas karena jalan merupakan faktor vital yang dapat mendukung aksesibilitas masyarakat di desa, serta berpengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat. Karena dengan kondisi jalan yang baik memungkinkan masyarakat untuk lebih produktif sehingga berdampak juga terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Terkait pembangunan yang dilaksanakan di Desa Gayam tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, melainkan juga melakukan pembangunan yang bersifat non fisik. Seperti bantuan untuk UMKM, adanya pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan wisata serta kegiatan yang melibatkan PKK. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan program pembangunan desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, tidak hanya pembangunan fisik yang tampak tetapi ada juga pembangunan non fisik yang menjadi dasar perubahan.

Usulan dari masyarakat terkait pembangunan yang sebelumnya telah masuk dalam RPJM Desa tidak dapat dilaksanakan semua dalam waktu bersamaan meskipun telah ditentukan prioritas pembangunan tiap tahunnya. Menurut pemerintah desa hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang ada. Karena pemerintah desa juga harus dapat membagi anggaran untuk bidang-bidang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah Desa Gayam bahwa saat penyusunan RPJM Desa setiap dusun dapat mengajukan lebih dari 3 usulan. Kalau ketiga usulan dibangun otomatis anggaran tidak akan cukup. Akhirnya dalam musrenbang penyusunan RKP Desa ditentukan titik yang akan dibangun tahun 2022 dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dan untuk usulan lainnya yang belum termasuk dalam prioritas pembangunan pada tahun tersebut tetap akan dijalankan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selain melakukan penentuan prioritas pembangunan dari usulan setiap dusun, pemerintah desa juga menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang dijalankan pemerintah kabupaten dengan cara sebagai berikut.

“Pertama kita tampung usulan dari masyarakat, kondisi atau permasalahan yang ada di lingkungan kita tampung dan rekap dulu. Setelah itu disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada di kabupaten. Kalau belum diusulkan di masyarakat akan kita tambah sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Kediri”. (Bapak Nanang, wawancara tanggal 24 November 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu menampung usulan dari masyarakat. Namun apabila dari masyarakat belum mengajukan usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dari tingkat kabupaten, pemerintah desa akan memberi tambahan usulan. Karena kesamaan prioritas pembangunan pada tingkat kabupaten dan desa akan mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

4. Akuntabel

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akuntabel diartikan sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini indikator akuntabel akan memfokuskan pada tahapan yang dilalui mulai dari proses perencanaan-pelaksanaan pembangunan serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan informasi dari pemerintah Desa Gayam secara umum proses pembangunan dimulai dari tahapan penyusunan APBDes, penyusunan rencana pembangunan baik jangka waktu menengah dan tahunan, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam diawali dengan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa tahun 2022. Ada 2 cara yang dilakukan dalam penyusunan draft RKP Desa, yaitu lokakarya dan rapat kerja. Lokakarya adalah penyusunan draft RKP Desa dengan melibatkan masyarakat dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Seperti pemaparan

pengkajian ulang dokumen RPJM Desa, penyepakatan masalah prioritas, penyepakatan plafon anggaran per bidang agar tidak terfokus pada bidang infrastruktur saja, penyusunan tabel kegiatan berdasar sumber anggaran serta penyusunan dokumen draft RKP Desa. Sedangkan rapat kerja merupakan kegiatan penyusunan draft RKP Desa tanpa melibatkan masyarakat, hanya dihadiri oleh Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) beserta pemandu. Hal tersebut dilakukan karena hasil dari rapat kerja akan disampaikan saat pelaksanaan Musrenbang Desa untuk mendapat tanggapan dari masyarakat (Djohan, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penyusunan draft RKP Desa di Desa Gayam dilakukan melalui rapat kerja. Dihadiri oleh kepala desa selaku pembina serta tim penyusun RKP Desa tahun 2022 yang diketuai oleh sekretaris desa beserta 1 sekretaris tim dan 8 anggota. Rapat kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 bertempat di Balai Desa Gayam. Hasil rapat kerja disampaikan kepada masyarakat dalam musrenbang desa yang diadakan hari Senin, 25 Oktober 2021 sebagai bukti akuntabilitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa.

Setelah proses penyusunan draft RKP Desa, bentuk tanggung jawab pemerintah desa dilanjutkan dengan menyampaikan progress pembangunan serta melaporkan hasil dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat saat pelaksanaan musrenbang desa. Setiap program pembangunan yang dijalankan juga memiliki jadwal atau *schedule* pelaksanaan. Untuk memastikan agar program pembangunan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Misal pada program pembangunan irigasi atau selokan akan dilakukan sebelum musim penghujan tiba. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir saat musim penghujan. Namun ada kendala yang dihadapi pemerintah desa terkait waktu pelaksanaan pembangunan yang sering kali mundur dari jadwal karena berkaitan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang terlambat.

“Ada *timeline/schedule* pelaksanaan pembangunan, tetapi juga menyesuaikan dengan dana transfer dari pemerintah pusat karena dana transfer juga molor di pertengahan tahun”. (Bapak Nanang, wawancara tanggal 24 November 2021)

Menurut pemerintah Desa Gayam meskipun dana transfer seringkali terlambat, namun paling tidak pemerintah desa telah membuat *schedule*

pelaksanaan pembangunan yang harus dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga pembangunan dapat tetap dijalankan.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Setiap Bidang Tahun 2021

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Bidang pemerintahan	1.268.938.204	1.002.411.984	266.526.220
2.	Bidang pembangunan	718.375.029	563.640.350	154.734.679
3.	Bidang Pembinaan	110.277.500	22.819.000	87.458.500
4.	Bidang pemberdayaan	56.148.000	20.280.000	35.868.000
5.	Bidang tak terduga	147.500.000	127.900.000	19.600.000
Jumlah Belanja		2.301.238.733	1.737.051.334	564.187.399

Sumber: Pemerintah Desa Gayam

Selain adanya pertanggungjawaban pada kegiatan musrenbang, pemerintah desa juga menunjukkan adanya pertanggungjawaban selama proses pembangunan dilakukan. Realisasi anggaran di atas menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap alokasi anggaran yang digunakan pada setiap bidang yang ada di desa. Dana yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pendapatan asli desa. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dalam realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Salah satunya pada bidang pembangunan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 718.375.029 tapi dalam realisasinya baru terlaksana sebesar Rp. 563.640.350 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 154.734.679 yang belum terealisasi, berlaku juga dengan bidang-bidang lainnya. Menurut pemerintah desa hal tersebut terjadi lantaran dana transfer yang terlambat sehingga masih ada kekurangan dari yang sebelumnya dianggarkan. Selain itu data realisasi anggaran masih tercatat sampai bulan November 2021 sehingga ada beberapa anggaran yang belum terserap untuk kegiatan yang belum dilaksanakan.

5. Pemberdayaan

Menurut (Wahyuningsih dan Pradana, 2021) pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan perubahan di masyarakat terhadap sektor perekonomian dan sosial budaya. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat Desa Gayam untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga berpengaruh juga terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat. Pada hasil notulensi rapat tim penyusun RKP Desa tahun 2022 yang diadakan pada tanggal 24 Agustus 2021 pelatihan pengelolaan pariwisata dan bantuan modal UMKM

menjadi perhatian di bidang IV pemberdayaan masyarakat. Sehingga pariwisata dan UMKM telah menjadi prioritas pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan perdesaan yang memiliki ciri-ciri khusus untuk dijadikan sebuah tujuan wisata (Arida dkk, 2017). Ada 2 lokasi yang memiliki potensi luar biasa sehingga dikembangkan menjadi sektor wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu Pancar Wonotirto dan Rest Area.



Gambar 10. Wisata Pancar Wonotirto di Desa Gayam

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Tempat wisata ini dulunya merupakan pinggiran sungai seperti pada umumnya. Namun adanya inisiatif dari kelompok masyarakat sekitar akhirnya tempat ini dikelola dan dikembangkan menjadi tempat wisata. Menambah beberapa stand untuk masyarakat berjualan dan juga memperbaiki fasilitas umum lainnya seperti toilet, jembatan, dan spot foto baru untuk memperindah lokasi wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di tempat wisata diperoleh informasi bahwa untuk pengelolaan tempat wisata Pancar Wonotirto sepenuhnya masih dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Dusun Wonokasih Desa Gayam tepatnya di RW 8. Namun pemerintah Desa Gayam khususnya kepala Desa Gayam selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat dan melakukan pengecekan ke lokasi hampir setiap hari. Sementara ini seluruh pendapatan dari tempat wisata digunakan untuk pengelolaan wisata mulai dari sewa lahan parkir, petugas dan pengelola serta pembangunan wisata. Hal tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, bahwa BUMDes di Desa Gayam belum berjalan sampai tahun ini. Sehingga menyebabkan unit-unit usaha yang ada di desa belum berjalan maksimal dan belum terakomodir sepenuhnya oleh pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki rencana ke depan yang telah dibahas dalam musrenbang desa untuk mengoptimalkan BUMDes serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat

supaya dapat bekerjasama dalam mengembangkan potensi yang ada di desa untuk mensejahterakan masyarakat.



Gambar 11. Rest Area yang Berada di Desa Gayam

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Sejalan dengan tujuan pendirian tempat wisata dan pembangunan rest area yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sehingga untuk pedagang yang menggunakan lapak di rest area maupun tempat wisata Pancar Wonotirto diutamakan warga Desa Gayam. Untuk pedagang di wisata Pancar Wonotirto mayoritas berasal dari Dusun Wonokasian. Sedangkan pedagang di Rest Area, pemerintah desa memiliki beberapa pertimbangan. Seperti diprioritaskan untuk masyarakat yang telah memiliki usaha berjalan serta kemampuan untuk berjualan di lokasi tersebut. Selain itu dipertimbangkan juga kondisi perekonomian masyarakat, selanjutnya masyarakat akan diberi peluang untuk dapat membuka usaha baik di rest area ataupun tempat wisata.

“Ada pembinaan dari desa untuk cara-cara berdagang, yang baik seperti apa dan harus bagaimana”. (Ibu Sri Utami, wawancara 24 November 2021)

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam berdagang agar dapat meningkatkan perekonomian. Sehingga tidak hanya menyediakan lokasi untuk berjualan, pemerintah desa juga melakukan pendampingan dan pembinaan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Karena keterbatasan tempat dan lapak mengharuskan pemerintah desa untuk memilih dan memilih siapa saja yang dapat menggunakan tempat usaha di Rest Area maupun tempat wisata Pancar Wonotirto. Namun hasil pengamatan langsung di lokasi diperoleh informasi bahwa terdapat pedagang diluar warga Desa Gayam dapat berjualan di sekitar Rest Area. Karena mereka telah berjualan sebelum adanya pembangunan Rest Area. Sehingga karena kebijakan dari pemerintah desa yang memprioritaskan masyarakat desa gayam untuk menggunakan fasilitas berdagang di Rest Area,

untuk pedagang di luar warga desa akhirnya di relokasi atau dialihkan diluar lokasi Rest Area. Meskipun demikian, menurut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, pembangunan Rest Area dan wisata Pancar Wonotirto memberikan dampak yang cukup baik terhadap perekonomian masyarakat.

6. Keberlanjutan

Keberlanjutan diartikan bahwa perencanaan tidak dapat berhenti pada satu tahapan, tetapi harus berlanjut terus-menerus untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta perlu adanya evaluasi untuk melakukan perbaikan selama proses perencanaan dilakukan (Ma'rif dkk, 2010). Penelitian ini akan memfokuskan pada keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan dalam musrenbang desa, pengawasan pada program pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat dari program pembangunan yang dijalankan.



(sebelah timur) (sebelah barat)

Gambar 12. Pembangunan Jalan di Dusun Gayam Barat

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar di atas menunjukkan bahwa proses pengaspalan jalan desa tepatnya di Jl. Imadudin Dusun Gayam Barat belum selesai 100%. Menurut hasil penelitian di lokasi diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019 dilakukan makadam di jalan tersebut tepatnya timur perempatan sejauh 450 meter. Dilanjutkan pada tahun 2021 proses pengaspalan jalan sejauh 450 meter. Dan pada tahun 2022 direncanakan akan dilanjutkan proses makadam dan pengaspalan jalan di sebelah barat perempatan sejauh 530 meter. Memungkinkan terjadi apabila 1 program pembangunan tidak terselesaikan dalam satu waktu sekaligus. Apalagi pembangunan yang sifatnya fisik dan membutuhkan biaya besar, hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah desa tidak mencukupi.

Selanjutnya untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dilaksanakan rapat evaluasi rutin setiap semester. Proses evaluasi dilaksanakan bersama dengan BPD pada semester 1

di awal tahun dan semester 2 mendekati akhir tahun. Rapat evaluasi juga dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan setiap dusun di Desa Gayam. Pertemuan tersebut juga membahas progress pembangunan yang sedang dijalankan dan kendala yang dihadapi untuk dapat ditemukan solusi bersama. Sejauh ini, program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan jalan desa yang dilakukan secara bertahap dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau fasilitas umum dan sektor perekonomian yang ada di desa.

PENUTUP

Simpulan

Musrenbang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun tingkat desa sekalipun. Kegiatan musrenbang menunjukkan bahwa dalam pembangunan perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Seluruh elemen masyarakat yang ada harus turut dilibatkan untuk dapat mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai wadah aspirasi masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama wawancara dan observasi serta beberapa dokumen terkait pelaksanaan musrenbang di Desa Gayam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musrenbang telah berpedoman pada aturan-aturan yang telah ada di tingkat kabupaten. Selain itu penerapan ke enam prinsip dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pembangunan desa dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dan indikator yang paling dominan dalam pelaksanaan musrenbang desa serta pembangunan di Desa Gayam adalah adalah partisipasi masyarakat. Terbukti dengan keterlibatan masyarakat di setiap kegiatan pembangunan desa.

Selain indikator partisipasi diperoleh beberapa temuan yang dapat mendukung tujuan penelitian ini. Yaitu kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam segala program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah desa, termasuk dalam pelaksanaan musrenbang desa. Hal tersebut sebanding dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dijalankan. Selain dengan masyarakat, kerjasama antar lembaga dalam pemerintahan desa seperti kepala desa,

perangkat desa, BPD dan lembaga masyarakat lain juga berjalan baik. Hubungan antar lembaga desa dapat menciptakan harmonisasi pembangunan desa yang terwujud melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan bersama serta adanya komunikasi dan peran aktif dalam pembangunan (Umanailo dkk, 2019). Komunikasi yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat dilakukan secara insidental, yang artinya dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan (Amirudin, 2018).

Pembangunan di Desa Gayam mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun saat ini dalam keadaan pandemi covid-19 yang juga membutuhkan penanganan khusus. Namun penelitian di lokasi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Gayam dapat menjalankan kegiatan dalam setiap bidang secara seimbang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya usulan dalam musrenbang desa tidak mempengaruhi adanya peningkatan pembangunan di desa. Faktor yang paling berpengaruh adalah selama proses pelaksanaan musrenbang dan pembangunan desa itu sendiri. Didukung adanya kerjasama dari semua elemen masyarakat yang ada di desa serta partisipasi aktif masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan yang ada di Desa Gayam, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Membuat daftar hadir sesuai undangan yang diberikan dalam pelaksanaan musrenbang desa.
2. Pengembangan media sosial pemerintah desa khususnya website untuk dapat menampung informasi terkait segala jenis kegiatan yang akan ataupun telah dilaksanakan, agar masyarakat diluar lingkungan Desa Gayam juga dapat mengakses.
3. Memprioritaskan pembangunan pada usulan yang belum terlaksana di tahun-tahun sebelumnya.
4. Membuat *timeline* kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang akan dijalankan.
5. Mengembangkan BUMDes untuk dapat menaungi beberapa unit usaha yang nantinya dikelola desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Melakukan pembinaan secara berkala kepada masyarakat yang berjualan di rest area dan pengelola tempat wisata "Pancar Wonotirto" untuk dapat mengembangkan sektor

perekonomian yang ada demi kesejahteraan masyarakat.

7. Mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat desa secara bergantian dan merata pada setiap RW ataupun dusun yang ada di Desa Gayam, agar komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat tetap terjaga. Serta agar proses evaluasi terkait program pembangunan dapat melibatkan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. dan Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. selaku dosen penguji
4. Bapak/ibu dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
5. Bapak Susila selaku Kepala Desa Gayam, Kabupaten Kediri
6. Bapak Nanang Sulistyio E. W., S.Pd selaku Sekretaris Desa Gayam, Kabupaten Kediri
7. Bapak Muhammad Zaifut selaku ketua RW 6 Dusun Wonokasian, Desa Gayam
8. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan dan motivasi
9. Sahabat dan teman-teman S1 Ilmu Administrasi Negara 2018 C
10. Warga Desa Gayam

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. N. (2011). Memahami Perkembangan Desa di Indonesia. *ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02).
- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*,2(1).<https://doi.org/10.26740/jps.i.v2n1.p26-32>
- Anggara, Sahya dan Sumantri, Ii. (2016). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktik)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aprilian, D. S. (2015). *Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015*. Universitas Jember.
- Ariadi, A. (2019). *Perencanaan Pembangunan Desa*.

- Meraja Journal*, 2(2).
- Arida, I. N. S., Wiguna, P. P. K., Narka, I. W., & Febrianti, N. K. O. (2017). Development Planning of Tourist Village Using Participatory Mapping (Case study: Mambal Village, Badung Regency, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 98(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012044>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri, (2020). *Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan*. http://103.236.150.132/web/fplanning/frekap_muscam diakses Sabtu, 30 Oktober 2021
- Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, (2021). *Pemulihan Ekonomi Menjadi Prioritas Dalam Musrenbang TA 2022*. <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2021/03/pemulihan-ekonomi-menjadi-prioritas-dalam-musrenbang-ta-2022> diakses pada Minggu, 31 Oktober 2021
- Djohani, R. (2016). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota*. <http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang> diakses pada Senin, 20 Desember 2021
- Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021
- Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., dan Adji, A. (2020). *Indikator Pembangunan Desa di Indonesia, Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
- Ma'rif, S., Nugroho, P., dan Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11). [http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_\(Musrenbang\)_Kota_Semarang_-_SAMSUL_M_dkk.pdf](http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang_-_SAMSUL_M_dkk.pdf) diakses pada Kamis, 23 Desember 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Puspitaningrum, E., dan Lubis, D. P. (2017). Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2 (4).
- Safira, Elfa. (2020). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan. *Repository.Umsu.Ac.Id*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3630> diakses pada Selasa, 8 Juni 2021
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan (Konsep, dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifulloh. (2008). *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)*. <https://id.scribd.com/document/127320738/teori-perencanaan-pembangunan> diakses Jumat, 23 Juli 2021
- Umanailo, M. C. B., Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (n.d.). Village Head Partnership , Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development Village Head Partnership , Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8 (8).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*. <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i2.528>

